

**PERAN KPU KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**MULYA RAHMAN**

**(PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP,  
SEMARANG)**

**ABSTRAKSI**

Dalam proses Pemilu baik Pileg, Pilpres, Pilgub maupun Pilkada adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik itu Provinsi atau Kota sangatlah penting. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Serta masyarakat dalam mesukseskannya menjadi sangat penting. Lancar, sukses dan berkualitas atau tidaknya pelaksanaan Pemilu salah faktor utama yang menentukannya adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui peran apa saja yang sudah di lakukan KPU Kota Semarang sehingga dapat meningkatkan tingkat partisipasi politik di Kota Semarang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumen.

Dengan hasil yang didapat oleh peneliti antara lain KPU Kota Semarang telah menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sosialisai langsung maupun sosialisasi tidak langsung, dan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat, keberhasilan KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan kerjasama yang baik antar lembaga untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat. Diharapkan peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum selanjutnya akan semakin tinggi.

Kata kunci: Peran, Partisipasi, Sosialisasi, Pemilu, Tingkat Partisipasi, Pemilu.

**THE ROLE OF SEMARANG'S KPU IN INCREASING SOCIETY  
POLITICAL PARTICIPATION ON THE GOVERNOR ELECTION OF  
CENTRAL JAVA IN 2018**

**MULYA RAHMAN**

**(SCIENCE OF GOVERNMENT FISIP UNDIP, SEMARANG)**

**ABSTRACT**

In the electoral processes, such as legislative, president, and governor election, KPU in the province as well as city has important role. KPU is a institution of election organizer that is national, permanent, independent. KPU must free from the influence of any party relating to the implementation of its duties and authorities. Society participation becomes very important in the success of election. One of the main factors that makes election success or not is how society participation in using their right to vote.

In this study, the researcher want to know what KPU has done in increasing society political participation in Semarang with using descriptive qualitative method. This study is conducted in Semarang, Central Java with using data collecting method, such as interview and document.

The findings of this study are Semarang's KPU has carried out its role in increasing society political participation through direct and indirect socialization to all society, the success of Semarang's KPU in increasing society participation, and well cooperation between institutions in increasing society social participation. It is expected that the role of Semarang's KPU in increasing society political participation in the next election will be even better.

Keyword: Role, Participation, Socialization, Election, Level of Participation, Election.

## 1.1 Latar Belakang

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan salah satu kegiatan yang mengajarkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses demokrasi. Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Fungsi pemilu adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik.<sup>1</sup>

Dalam sejarah Pemilu-Pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih tidak jarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan Pemilu. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil Pemilu memiliki legitimasi yang kuat atau rendah.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa

---

<sup>1</sup> Arbi Sanit. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 158

relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.<sup>2</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Semarang tidak lepas dari tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dalam menyelenggarakan proses Pilkada agar terciptanya kondisi pemilihan yang kondusif dan berjalan dengan lancar. Tugas dan wewenang KPU Kota Semarang dimulai dari sosialisasi adanya Pilkada serentak sampai dengan proses penghitungan akhir suara. KPU Kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat mulai dari pemilih baru sampai pemilih lama. Karena target partisipasi masyarakat pilkada tahun ini di Indonesia meningkat dari 65,45 % menjadi 77,5 %.

---

<sup>2</sup> Sudijono Sastroatmodjo.1995. *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press. Hlm. 56

<sup>3</sup> <http://www.kpu-semarangkota.go.id/Seputar-KPU>, diakses tanggal 29/6/2018

Oleh karena itu hal ini menjadi fokus bagi peneliti untuk melihat bagaimana “Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018?

## **1.3 Metode Penelitian**

Pada penelitian tentang Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Sedangkan pemahaman deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>5</sup> Metode yang dijelaskan demikian diharapkan nantinya dapat membantu peneliti dalam

---

<sup>4</sup> Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm.51

<sup>5</sup> Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. Hlm. 23.

mengkaji dan menanalisis data maupun temuan lainnya selama melakukan penelitian Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018.

#### **1.4 Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat kota Semarang**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 di Kota Semarang antara lain sebagai berikut:

#### **1.5 Sosialisasi langsung**

Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang sangat maksimal mulai dari sosialisai kepada pemilih pemula, sosialisasi kepada masyarakat di acara car free day, sosialisasi ke LP, sosialisasi kepada masyarakat yang disabelitas & tunanetra, sampai sosialisasi kepada masyarakat di daerah yang terpencil. Hal ini tentunya sudah menjadi tanggung jawab KPU Kota Semarang karena pada pemilihan umum semua lapisan dan kalangan masyarakat mempunyai hak sama dalam menentukan pilihan.

Pada sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 kepada perwakilan beberapa dari sekolah SMA dan SMK se Kota Semarang. Sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pendidikan politik, informasi politik mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah 2018. Sosialisasi kepada perwakilan dari sekolah ini diharapkan mampu menjadi agen sosialisasi di sekolahnya masing-masing. Seperti contoh di beberapa sekolah menjalankan sosialisasi melalui PEMILOS (Pemilihan Ketua Osis). Dalam kegiatan tersebut semua dirancang seperti pada pemilu yang sebenarnya, mulai dari tata cara pemilihan, kotak suara yang dipakai, dll. Hal ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana prosedur cara memilih sehingga pada saat pemilihan yang sesungguhnya para pemilih pemula menjadi paham saat harus memilih. Sosialisasi kepada pemilih pemula melalui perwakilan beberapa sekolah dirasa belum cukup maksimal dikarenakan hanya perwakilan dan apakah dari beberapa perwakilan sekolah tersebut dapat menjadi agen sosialisasi berikutnya untuk di masing-masing sekolah tersebut masih menjadi kelemahan dalam mensosialisasikan kepada pemilih pemula melalui perwakilan sekolah.

KPU Kota Semarang juga melakukan sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 kepada masyarakat di acara car free day, dengan cara menyanyikan lagu-lagu legendaris dan maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah 2018, semua masyarakat berkumpul dan bernyanyi hingga berjoget bareng dengan maskot Semar. Sosialisasi dengan menggandeng musisi untuk nyanyi bareng dan menyampaikan informasi terkait pemilu. Dengan cara yang berbeda dan tidak membosankan menjadikan komunikasi agar lebih interaktif dengan masyarakat karena masyarakat dapat tetap senang dengan

benyanyi, dan juga menjadi tahu pesan – pesan informasi mengenai pemilu yang disampaikan. Dilokasi sosialisasi juga disediakan layanan Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara online untuk masyarakat yang ingin mengetahui apakah namanya sudah tercantum pada Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Sosialisasi langsung yang diberikan oleh KPU Kota Semarang juga sudah melingkupi semua kalangan seperti contoh mengadakan sosialisasi kepada warga binaan LP perempuan dan sosialisasi kepada para disabilitas & tunanetra. KPU Kota Semarang memberikan sosialisasi bahwa semua orang yang sudah sesuai persyaratan untuk memilih adalah hak masing-masing tanpa memandang bahwa orang tersebut warga binaan atau disabilitas & tunanetra, karena suara yang memilih nantinya akan berpengaruh terhadap hasil kedepannya. Dengan adanya sosialisasi kepada warga binaan LP perempuan dan disabilitas & tunanetra, diharapkan mereka untuk tetap melakukan pemilihan untuk memilih dan tidak menjadikan keterbatasan yang mereka hadapi saat ini menjadi penghalang untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.

Walaupun Semarang termasuk dalam 5 kota terbesar di Indonesia, tidak menutup kemungkinan masih ada daerah yang aksesnya masih belum terjangkau oleh KPU Kota Semarang untuk melakukan sosialisasi. Untuk itu KPU Kota Semarang tetap memprioritaskan daerah yang sekiranya perlu untuk disosialisasikan mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah 2018. Seperti contoh KPU Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada di Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen. Diharapkan masyarakat menjadi mengerti bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 akan ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan masyarakat ikut berpartisipasi untuk melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018.

### **1.6 Sosialisasi tidak langsung**

Penyebaran informasi melalui alat peraga pada saat ini masih digunakan, seperti baliho, poster, panflet, pin, spanduk, stiker, topi, kaos. Konten atau isi bahan alat peraga tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat atau pasangan kandidat, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Pesan-pesan atau gambar yang dimuat bertujuan selain untuk memberikan informasi dengan alat peraga ini nantinya ada ajakan untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018. Alat peraga juga sangat membantu kinerja dari KPU Kota Semarang karena dengan alat peraga yang sudah ditempatkan dititik-titik tertentu yang sudah di tetapkan agar semua masyarakat mudah melihat dan alat peraga yang dipergunakan dikemas semenarik mungkin untuk menarik perhatian masyarakat dan masyarakat menjadi mengerti maksud yang disampaikan oleh alat peraga tersebut. Keberadaan Alat Peraga seperti baliho, poster, pin, spanduk, stiker masih dipergunakan KPU Kota Semarang untuk bersosialisasi diharapkan mampu menjangkau masyarakat untuk mendapatkan bekal informasi calon dan visi-misi serta mampu mengajak

semua kalangan pemilih untuk memilih dalam menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat yang telah disediakan.

Yang kedua sosialisai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 tidak langsung melalui media sosial, pada zaman yang sudah modern seperti saat ini media sosial tentu menjadi sasaran untuk kegiatan sosialisasi KPU Kota Semarang. Dikarenakan banyak sekali orang yang menggunakan sosial media. Pemasangan poster ajakan mencoblos pemilu di pinggir jalan atau di balai desa hanya dilihat sambil lalu, tapi poster yang tersebar di media sosial akan dilihat saat mereka bangun tidur, sela-sela waktu bekerja, saat mereka duduk minum kopi di kafe, sampai saat mereka hendak tidur lagi. KPU melihat fenomena ini sebagai kesempatan besar untuk mendongkrak partisipasi pemilih. Banyak keuntungan yang didapat dari sosialisasi melalui media sosial, salah satu keuntungannya yaitu tidak dana yang banyak untuk melakukan sosialisasi, tidak membuang banyak waktu yang dibutuhkan saat sosialisasi. Dengan memposting sosialisasi yang menarik perhatian tentunya semakin banyak orang yang mengetahui bahwa akan ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018. KPU Kota Semarang sudah membuat hampir semua media sosial mulai dari facebook, twitter, website, dan instagram. Sosialisasi melalui media sosial ini lebih mentargetkan kepada calon pemilih yang sudah mengerti akan teknologi, terutama pemilih pemula yang lebih banyak menggunakan media sosial dengan memaksimalkan segala macam media

sosial yang KPU punya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terutama kepada pemilih pemula. Dengan gencarnya sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 melalui sosial media, KPU Kota Semarang juga masih menggunakan media lainnya seperti media cetak dan media elektronik, hanya saja media tersebut tidak segegar seperti dulu sebelum adanya media sosial. Karena masih banyak beberapa orang yang menggunakan media cetak dan media elektronik pada saat ini.

### **1.7 Partisipasi masyarakat Kota Semarang pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 di Kota Semarang**

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Tingkat keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat dari tingginya tingkat Partisipasi masyarakat, hal ini terbukti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kota Semarang tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari pemilihan sebelumnya yaitu 72,80% dibandingkan pemilihan walikota sebelumnya 65% dan Pilgub yang sebelumnya hanya 62-63%. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa KPU Kota Semarang cukup efektif untuk menggerakkan partisipasi

masyarakat Kota Semarang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kota Semarang.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu tingkat kesadaran masyarakat pada pemilihan umum menjadi faktor meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kota Semarang dapat menjadi acuan bahwa KPU Kota Semarang melakukan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan KPU RI sebesar 77,5%, KPU Kota Semarang dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerja untuk pemilihan kedepan yang terdekat yaitu pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

### **1.8 Mitra KPU Kota Semarang dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 di Kota Semarang**

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang mencapai

72,80% tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara KPU Kota Semarang dengan lembaga/stakeholder yang ikut mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018. Tercatat bahwa ada hampir kurang lebih 47 lembaga yang bekerjasama dengan KPU Kota Semarang. Mulai dari lembaga pemerintah sampai komunitas yang ada di Kota Semarang. Tujuan kerjasama antara KPU Kota Semarang yaitu sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kota Semarang untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kota Semarang. Dengan mekanisme kerjasama yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari sosialisasi kepada anggota-anggota yang ikut tergabung dalam lembaga tersebut dan juga masyarakat umum lainnya. Kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang dengan lembaga lain tentunya di fasilitasi dan diawasi oleh KPU Kota Semarang, seperti materi sosialisasi yang diberikan langsung oleh KPU Kota Semarang.

Dengan adanya kerjasama seperti ini langkah KPU Kota Semarang untuk melakukan sosialisasi menjadi lebih mudah. Tanpa adanya kerjasama dengan lembaga atau stakeholder yang terlibat tentunya akan sulit bagi KPU Kota Semarang untuk melakukan peranan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kota Semarang.

## **1.9 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU Kota Semarang telah menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Semarang. Sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kota Semarang kepada masyarakat sudah sangat maksimal mulai dari sosialisai langsung maupun sosialisasi tidak langsung, dan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Semarang, tercatat tingkat partisipasi Kota Semarang meningkat menjadi 72,80% dibandingkan pemilihan walikota sebelumnya 65% dan Pilgub yang sebelumnya hanya 62-63%. Adanya kerjasama antara KPU Kota Semarang dan lembaga lain tentunya menjadikan kinerja KPU Kota Semarang semakin dipermudah dan dapat maksimal dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Semarang.

## **1.10 Rekomendasi**

Sebagaimana kesimpulan tersebut diatas maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut KPU Kota Semarang diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat agar pelaksanaan pemilhan umum yang selanjutnya dapat mencapai targe dan diharapkan untuk lebih gencar lagi melakukan

sosialisasi terutama pada masyarakat yang berada di daerah terpencil yang ada di Kota Semarang dan pemilih pemula. Hal ini dilakukan agar angka golput yang sering terjadi oleh masyarakat daerah terpencil dan pemilih pemula dapat berkurang. Untuk masyarakat Kota Semarang diharapkan untuk lebih sering mengikuti informasi baik dari segala media atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kota Semarang. Agar tumbuh kesadaran akan pentingnya mengikuti Pemilihan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Almond, G. (2015). *Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ach, W. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina.
- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, R. (2003). *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC.
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- . (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dantes, N. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Gabriel, A. A. (2015). *Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huntington Joan Nelson, S. P. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. (terjemahan), Jakarta: Rineka Jaya.
- Lexy, J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prihatmoko, J, J. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I Press.
- Quinn Patton, M. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta.
- RagaMaran, R. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramlan, S. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana.
- Samuel P, H. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Jaya.
- Sanit, A. (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanit, A. (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang.

Satori, D., & Aan Komariah. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sitepu, P. (2012). *Teori-Teori Politik*. Graha Ilmu.

Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

T.O, I. (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wahyu, M. (2007). *Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: IRCiSod.

Wahyu, P. (2007). *Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: IRCiSod.

### **Website**

<http://www.kpu-semarangkota.go.id/Seputar-KPU> diakses tanggal 29/6/2018  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25799/Cover.pdf;jsessionid=7002658F900885CDA6CC0B2B2F855449?sequence=6> diakses tanggal 29/06/2018

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/3741/1/MUH.%20IMAM%20ADIL%20AQIL.pdf> diakses tanggal 29/06/2018

<http://jateng.tribunnews.com/2018/07/05/pilgub-jateng-2018-partisipasi-pemilih-kota-semarang-mencapai-7280-persen>.

<http://kpu-semarangkota.go.id/Seputar-KPU>, diakses tanggal 20/09/2018

### **Lain-lain**

BPS Kota Semarang 2015.

Gartiria Hutami, Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang) (Universitas Diponegoro, Jurnal). Hal. 5.

Siswo Dkk, Upaya Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, (Kutai, Sebuah Journal 2014). Hal. 1188-1189.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 “Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” (Jakarta: 2010). Hal 47-51.

Tony Djogo Dkk, Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri ( Bogor : World Agroforestry Centre (ICRAF) 2003). Hal.3-4.

